

**PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN WAMPU KABUPATEN
LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

HAMONANGAN

NPM : 97.850.0002



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 0 1

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN WAMPU KABUPATEN
LANGKAT

Nama : **HAMONANGAN**

NPM : . 97.850.0002

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing I

Mengetahui
Komisi Pembimbing

Pembimbing II

Drs. Sismudjito. MSi

Drs. Irfan Simatupang

Ketua Program Studi

Mengetahui

Dekan

Taufik Siregar, SH.M.Hum

Drs. Heri Kusmanto, MA

Tanggal Lulus : 6 September 2001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. pemilik seluruh kekuatan yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya dan kekuatan lahir dan bathin kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai urusan sebagaimana mestinya

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan umat sehingga akhir zaman, Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafa'at beliau di Yaumul Akhir.

Skripsi ini berjudul "PEMBENTUKAN WILAYAH KECAMATAN GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN (STUDY KASUS DI KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT)." dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan tulisan ilmiah ini banyak menemui kesulitan-kesulitan baik waktu mengadakan riset maupun dalam merangkai kalimat demi kalimat. Hal ini jelas, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan plus pengalaman yang penulis miliki.

Namun begitu, atas pengarahan dan bimbingan yang diberikan Dosen pembimbing, akhirnya penulis dapat mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi tersebut. Karenanya, sebagai rasa syukur hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan masing-masing kepada:

1. Bapak Ir. Zulkarnaen MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak, Drs Heri Kusmanto MA, Dekan Fisipol Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Sismudjito MSI bertindak sebagai Dosen Pembimbing I

4. Bapak Drs. Irfan Simatupang bertindak sebagai dosen pembimbing II
5. Bupati Langkat beserta Staff yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengikuti perkuliahan
6. Ibu Camat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Dan Sekwilcam beserta Staf yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data untuk penulisan skripsi ini
7. Sahabat-sahabatku, T. A Halim, A. Husin Siregar, dan teman-teman mahasiswa jurusan Administrasi Negara yang banyak memberikan bantuan kepada penulis
8. Teristimewa untuk Ayahnda, Abdul Rahman Siregar dan Ibunda Hasmah Harahap yang telah memberikan dorongan baik moral maupun material sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Khusus kepada istriku tercinta Raslina Br. Sinuraya dan Anakku tersayang, Khairunnisya Br. Siregar, yang memberi semangat kepada penulis
- 10 Saudara-saudaraku yang juga memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada mereka semua. Amin.....

Medan, 2001

Penulis

HAMONANGAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Dasar Pemikiran	10
F. Hipotesisi	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Camat dan Kecamatan	15
B. Pengertian Pembangunan	16
C. Pengertian Pembangunan di Wil. Kecamatan .	20
D. Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Camat Sebagai Kepala Wilayah	21
E. Tugas Kepala Wilayah Kecamatan Sebagai Administrator Pemerintahan, Pembangunan dan Administrator Kemasyarakatan	25
BAB III METHODOLOGI PENELITIAN	28
A. Populasi dan Sampel	28
B. Metode Pengumpulan Data	29
C. Variabel dan Definisi Operasional	31
D. Metode Analisis Data	33

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAN PENELITIAN	34
	A. Keadaan Alam	34
	B. Keadaan Masyarakat	35
	C. Pemerintahan Kecamatan Wampu	41
BAB V	ANALISIS TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH KECAMATAN WAMPU	45
	A. Proses Pembentukan Wilayah Kecamatan Wampu	45
	B. Struktur Organisasi Kecamatan Wampu	47
	C. Pembahasan Tentang Wewenang Tugas dan Kewajiban Kepala Wilayah Kecamatan Wampu	60
	D. Peranan Camat dalam Mengemban Tugas – Tugas dibidang Pembangunan	62
	E. Peranan Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan	67
	F. Beberapa Masalah dan Pemecahannya	71
BAB VI	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tentang Pemerintah Daerah. Bunyi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian dasar hukum adanya daerah-daerah otonom tersebut adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Sekalipun wilayah Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan wilayah-wilayah administratif, namun wilayah Republik Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat daerah administratif belaka, itu semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan tiga azas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan dapat juga diselenggarakan berdasarkan atas tugas pembantu (medebewind).

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah Tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Jadi ini bersifat otonom.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Sedangkan tugas pembantu (medebewind) adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Adapun dasar atau alasan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 atas daerah besar dan kecil baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif adalah menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan. Tertib pemerintahan tersebut adalah dimaksudkan untuk menegaskan adanya kedudukan yang sama tinggi (nevenschikkend) dan untuk menjamin adanya kerjasama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian dalam tertib pemerintahan, maka aspek yang sangat penting adalah ditaatinya peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah baik oleh rakyat, oleh Badan-badan Pemerintah, oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pejabat-pejabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Bayu Suryaningrat, *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab*, Patco, Jakarta, Surabaya, 1961 hal 89.
- J. Vreden Berg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta 1985 hal 10.
- Koentjaraningrat, *Op.Cit*, hal 2
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1982 hal 17.
- Drs. Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1985 hal 213.
- Moh. Nazir, Phd, *Metode Penelitian Ghalia*, Jakarta, 1985 hal 64.
- Sopyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1982 hal 17
- Sondang P. Siagian, MPA, PHD, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982 hal 1.
- Drs. Taliziduhu Ndraha, *Administrasi Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1972 hal 32.
- WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal 181
- Prof. IDR. Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Karsito, Bandung, 1982 hal 39
- The Ling Gie, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, 1977 hal 232.
- The Ling Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, UGM Nur Cahaya, Yogyakarta, 1983 hal 79
- The Ling Gie, *Op.Cit*, hal 177 hal.
- Departemen Peneranga RI, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke II*, hal 219